

ABSTRAK

NAMA : **MUHAMMAD ROMLI**
NIM : **2180110025**
TAHUN : **2020**
JUDUL TESIS : *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Produk Simpanan Umroh Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Senyum Madani Lestari*

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah adalah, dengan dibuatnya suatu klausula perjanjian, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena nasabah dalam hal ini konsumen dalam bidang jasa mempunyai suatu hak yang dilindungi oleh Undang-undang. Salah satu Undang-undang yang memberikan hak perlindungan hukum adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan produk barang dan jasa bisa ditemukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, akan tetapi pada kenyataannya di Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani Lestari, salah satunya dalam bentuk akta perjanjian tidak ditemukan, sehingga menjadi suatu permasalahan hukum jika terjadi sengketa terutama dalam hal pembuktian.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui suatu bentuk-bentuk aturan hukum dalam hal perlindungan nasabah, sehingga dapat mengambil suatu analisis hukum terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT Senyum Madani Lestari.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran suatu teori tentang Negara Hukum, yang mana salah satu fungsi suatu Negara memberikan perlindungan hukum untuk masyarakatnya. Selain teori perlindungan hukum, teori penunjang dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perjanjian sebagai bagian-bagian dari perlindungan hukum itu sendiri.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini mempelajari hukum sebagai norma, pendekatan ini digunakan untuk memahami eksistensi BMT secara yuridis dan perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang didasarkan kepada analisis fakta hukum yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, dan Surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penulis menyimpulkan KSPPS BMT Senyum Madani Lestari dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya dalam Program Simpanan Umroh belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Karena masih banyaknya suatu hak-hak nasabahnya sebagai konsumen dalam bidang jasa yang masih belum terpenuhi menurut peraturan hukum yang berlaku. **Kata Kunci : Perlindungan Humum, Nasabah, Simpan Pinjam, Umroh**

ABSTRACT

NAME: MUHAMMAD ROMLI

NIM: 2180110025

YEAR: 2020

TITLE TESIS: Legal Protection of Customers in Umrah Savings Products in Savings and Loans Cooperatives and Bmt Sharia Financing Smile Madani Lestari

One form of legal protection that financial institutions provide to customers is by making an agreement clause, either in oral or written form. Because customers, in this case consumers in the service sector, have a right that is protected by law. One of the laws that provide legal protection rights is Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection. One of the protection rights for consumers who use goods and services can be found in article 4 of Law Number 8 of 1999, but in reality in the Financial Institution for Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing BMT Senyum Madani Lestari, one of which is a non found, so that it becomes a legal issue in the event of a dispute, especially in terms of proof.

The purpose of this study is to determine the forms of legal rules in terms of customer protection, so that they can take a legal analysis of the implementation of business activities carried out by BMT Senyum Madani Lestari.

This research departs from the idea of a theory of the rule of law, where one of the functions of a state is to provide legal protection for its people. In addition to the theory of legal protection, the supporting theories in this study are the theory of legal certainty and agreement theory as parts of legal protection itself.

This research method uses the normative juridical method, this method studies the law as a norm, this approach is used to understand the existence of BMT juridically and legal protection for customers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Based on the results of research conducted, which is based on an analysis of legal facts contained in the 1945 Constitution, the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 1 of 2013 concerning Institutions Microfinance, Civil Code Book III Concerning Engagement, and Decree of the Minister of State for Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 91 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 concerning Guidelines for Implementing Sharia Financial Services Cooperative Business Activities. The author concludes that KSPPS BMT Senyum Madani Lestari in carrying out one of its business activities in the Umrah Savings Program has not maximally provided legal protection to its customers. Because there are still many customer rights as consumers in the service sector that have not been fulfilled according to applicable legal regulations.

Keywords: *Protection of Public Relations, Customers, Savings and Loans, Umrah*